

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya mengenai “Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi” maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan Barang Milik daerah adalah serangkaian kegiatan atau tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien. Barang milik daerah tersebut diperoleh dari beban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) serta bisa didapat dari perolehan yang sah seperti dari perolehan hibah, (rochmansjah, 2015) pelaksanaan perjanjian kontrak dan diperoleh dari ketentuan perundang-undangan.
2. Aturan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi telah sesuai dengan pedoman pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2016.
3. Bentuk pengelolaan barang milik daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang sesuai prosedur pengelolaan diantaranya perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Semua prosedur atau siklus yang dilakukan tentunya dilaksanakan dengan berlandaskan beberapa azas pengelolaan barang milik daerah diantaranya :
 - a) Azas transparansi

- b) Azas akuntabilitas
- c) Azas efisiensi
- d) Azas fungsional
- e) Azas kepastian nilai
- f) Azas kepastian hukum

Jika pengelolaan barang milik daerah sudah dilakukan sesuai prosedur dan azas yang berlaku maka hasil pengelolaan akan optimal. Jika hasil pengelolaan barang milik daerah sudah baik dan optimal maka akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan suatu daerah. Semakin baik pula laporannya.

5.2 Saran

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang memungkinkan dapat membantu Badan Keuangan Kota Bukittinggi :

1. Suatu dinas pemerintahan akan menggambarkan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dengan melihat kinerja internalnya. Kinerja internal ini sangat penting bagi instansi pemerintahan. Sebaiknya kinerja internal yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi harus lebih profesional agar saat melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah berjalan lancar. Sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antar bidang.
2. Saat melakukan pengelolaan barang milik daerah pihak yang berwenang melakukan dengan baik, tertib dan tegas agar barang milik daerah yang dikelola pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama..